

**SKRIPSI**  
**GOVERNING PEMERINTAHAN KALURAHAN TERHADAP KARANG  
TARUNA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN NGLINDUR,  
KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**OLEH**  
**NAMA : Chasirimus Leu**  
**NIM : 19520081**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**



**GOVERNING PEMERINTAHAN KALURAHAN TERHADAP KARANG  
TARUNA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN NGLINDUR,  
KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Januari 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

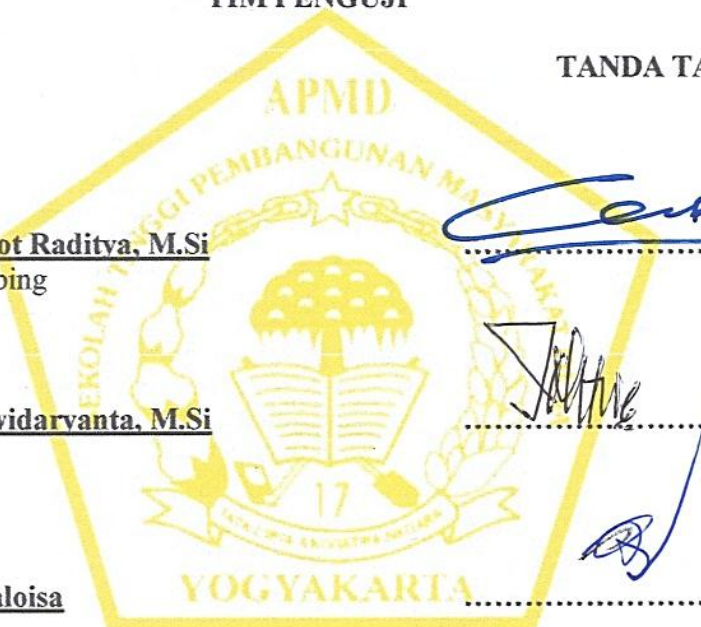
NAMA

TANDA TANGAN

Drs. R. Y. Gatot Raditya, M.Si  
Ketua/Pembimbing

Drs. Jaka Triwidarvanta, M.Si  
Penguji I

Dr. Rijel Samaloisa  
Penguji II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Chasirimus Leu

Nim : 19520081

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“*Governing* Pemerintahan Kalurahan Terhadap Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2024



Chasirimus Leu

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, bimbingan, penyertaan dan limpahan Rahmat-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“*Governing Pemerintah Kalurahan Terhadap Karang Taruna Dalam Pembangunan Di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY*”**, dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana strata 1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Tentu saja bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis dalam menimba ilmu pengetahuan
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
4. Bapak Drs. R. Y. Gatot Raditya, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dengan sumbangan pikiran, gagasan dan pengetahuan hingga sampai terselesainya penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah

6. membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan sehingga sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
7. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Nglindur yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Untuk orang tua, keluarga besar, sahabat dan kenalan penulis dan semua orang yang senantiasa berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Terimah kasih atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu per satu. Terimah kasih atas masukan, saran dan ide-ide yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca, sekiranya kritikan dan saran yang diberikan dari pembaca sebagai bentuk penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dalam dunia akademik.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Penulis

Chasirimus Leu

19520081

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat bimbingan, perlindungan dan penyertaan-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tanpa campur tangan dan uluran tangan kasih dari Tuhan dan Bunda Maria belum tentu saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan terimah kasih saya, maka saya persembahkan skripsi saya ini kepada semua orang yang ada disekitar saya yang dengan caranya masing-masing dalam mendukung saya selama proses penyelesaian skripsi ini:

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Romanus Raya dan Mama Kristina Kartini Tuto yang selama ini mendidik saya dengan sabar dan penuh kasih sayang, selalu mengajarkan kepada saya bagaimana bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Terimah kasih atas segala doa yang telah mengantarkan saya hingga sampai pada titik ini. Segala dukungan, arahan dan perjuangan kalian menjadi semangat dan kekuatan luar biasa bagi hidup saya, terkhususnya selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati Bapak dan Mama selalu.
2. Untuk adik saya Fabianus Witi Letu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini
3. Untuk keluarga besar Kamaleraq dan Amunmama yang dengan caranya masing-masing memberikan dukungan dan kekuatan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Untuk dosen pembimbing saya, Bapak Drs. R.Y. Gatot Raditya, M.Si yang telah membimbing saya dengan sabar dan tabah. Terimah kasih atas segala arahan, bimbingan dan pencerahan yang bapak berikan selama proses

penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan bapak, skripsi saya belum tentu selesai dengan baik. Semoga Tuhan selalu menyertai bapak dimanapun bapak berada

5. Untuk Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dengan caranya tersendiri membantu saya dalam menimba ilmu pengetahuan dan dalam proses penulisan skripsi ini
6. Untuk Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Nglindur yang sudah banyak membantu saya dalam kelancaran penelitian saya hingga sampai penyelesaian skripsi saya
7. Untuk semua anggota Kelompok Studi Tentang Desa (KESA) yang telah menjadi rumah belajar bagi saya dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan selama saya berada di Yogyakarta
8. Untuk Komunitas Mahasiswa Kedang Yogyakarta (KUAMAKEYO) yang telah menjadi rumah kedua bagi saya selama berada di Yogyakarta yang dengan caranya masing-masing mendukung dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini. Terimah kasih atas kebersamaan kita selama di Yogyakarta, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua
9. Untuk Abang Nasrudin, Abang Takdir, Abang Flory, Abang Tomi, Abang Haji, Abang Riki yang telah menuntun dan membantu saya selama berada di Yogyakarta dan telah mendukung saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan menyertai kalian semua
10. Untuk teman dan sahabat saya Kae Edwin, Pablo, Taufik, Bolsen, Anhar, Hendro, Bilson, Mia, Lian Geken, Adven, Dewi Pandong, Susi yang telah membantu saya selama proses penulisan skripsi ini. Terimah kasih atas segala dukungan, bantuan, motivasi dan kebersamaan kita selama ini.



Semoga kalian sehat selalu dan sukses dalam menggapai cita-citanya. Tuhan Yesus dan Bunda Maria menyertai kita semua.

11. Untuk semua orang yang tidak bisa saya sebut satu per satu, terimah kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah kalian berikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kira Tuhan Yesus dan Bunda Maria dapat membalas semua kebaikan kalian dan semoga Tuhan dan Leluhur leu auq menyertai setiap langkah kaki kita semua

## MOTTO

Hari kemarin sudah hilang. Hari esok belum datang. Kita hanya memiliki hari ini.

Mari Kita Mulai

(Bunda Teresa)

Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan

(John Wooden)

Tuhan, aku percaya pada jalan-Mu

(Chasirimus Leu)

## INTISARI

Perbuatan pemerintah dalam memerintah adalah penggunaan otoritas politik dengan mengedepankan fungsi pemerintahan seperti pengaturan publik, penyediaan kebutuhan publik dan juga pemberdayaan masyarakat. Konsep *Governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. Pemerintah desa yang memiliki otoritas tertinggi mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus ke pemerintahannya secara mandiri demi kemandirian desa dan kepentingan Masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa perlu menetapkan sebuah kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang insentif kepada generasi muda dengan mengedepankan kebutuhan organisasi karang taruna. Karena karang taruna merupakan salah satu mitra kerja pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan juga sebagai generasi penerus dimasa yang akan datang. Sehingga rumusan masalah yang dapat diambil adalah Bagaimana *Governing* pemerintahan Kalurahan terhadap Karang Taruna dalam Pembangunan desa di Kalurahan Nglindur?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Objek Penelitian ini adalah *Governing* Pemerintahan Kalurahan Terhadap Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur. Subjek dari penelitian ini terdiri dari Lurah, Carik, Ketua Karang Taruna, Wakil Karang Taruna, Jagabaya, Anggota Karang Taruna dan Masyarakat. Pada penelitian ini jumlah informan terdiri dari 8 orang. Teknik pengumpulan data terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi guna mendapatkan data dan informasi secara tepat dan jelas. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, *Governing* Pemerintahan Kalurahan Terhadap Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur menunjukkan bahwa, *pertama*, pemerintah Palurahan Nglindur telah mengakui keberadaan karang taruna dengan cara memberikan Surat Keputusan (SK) kepada karang taruna. SK ini menjadi payung hukum karang taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. *Kedua*, untuk mengakomodir kegiatan karang taruna maka pemerintah Kalurahan Nglindur telah mengalokasikan dan di setiap tahunnya yang termuat dalam APBKal. Karang taruna akan tumbuh dengan kokoh dan eksis jika ditopang dengan alokasi dana yang memadai. *Ketiga*, pemerintah Kalurahan Nglindur masih mengandalkan pihak dari luar dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada karang taruna. Ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kalurahan Nglindur terhadap karang taruna belum maksimal karena belum adanya kebijakan atau perbuatan yang menonjol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Nglindur terhadap Karang Taruna. Karang taruna hanya diberikan ruang di hari-hari besar yang merupakan rutinitas setiap tahunnya.

Kata Kunci: *Governing*, Pemerintah Kalurahan, Karang Taruna

## DAFTAR ISI

COVER .....	I
HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
LEMBAR PERNYATAAN .....	III
KATA PENGANTAR .....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	VI
MOTTO .....	IX
INTISARI .....	X
DAFTAR ISI .....	XI
DAFTAR TABEL .....	XIV
DAFTAR BAGAN .....	XV
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Literatur Review .....	11
F. Kerangka Konseptual .....	16
1. Governing .....	16
2. Pemerintahan Desa .....	29
3. Karang Taruna .....	22
G. Fokus Penelitian .....	25
H. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian .....	26

2. Unit Analisis .....	27
3. Teknik Pengumpulan Data .....	29
4. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR .....</b>	<b>35</b>
<b>DAN KARANG TARUNA NGLINDUR .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Profil Kalurahan Nglindur .....</b>	<b>35</b>
1. Sejarah Kalurahan Nglindur .....	35
2. Keadaan Geografis .....	38
3. Keadaan Demografi .....	40
4. Sarana dan Prasarana .....	44
5. Kondisi Sosial Ekonomi .....	45
6. Kondisi Budaya .....	46
7. Kondisi Pemerintahan .....	47
8. Kondisi Badan Permusyawaratan Kalurahan .....	50
9. Kondisi Lembaga Kemasyarakatan .....	51
10. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	52
<b>B. Gambaran Umum Karang Taruna .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Deskripsi Informan .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Perbuatan Pemerintah Terhadap Karang Taruna .....</b>	<b>62</b>
<b>C. Urgensi Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna .....</b>	<b>72</b>
Di Tingkat Kalurahan .....	72
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>84</b>

DAFTAR PUSTAKA .....	86
PANDUAN WAWANCARA .....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Informan .....	29
Tabel II.1 Luas Wilayah .....	39
Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan Usia .....	41
Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	42
Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	43
Tabel II.5 Struktur BPKal Kalurahan Nglindur .....	51
Tabel III.1 Data Informan Berdasarkan Usia .....	60
Tabel III.2 Data Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	61
Tabel III.3 Data Informan Berdasarkan Pekerjaan .....	61

## DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Nglindur .....	49
Bagan II.2 Struktur Organisasi Karang Taruna Nglindur .....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan UU Desa membawa angin segar dan harapan baru bagi desa. Ini menjadi titik awal bagi desa dalam menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Dengan hadirnya UU Desa ini maka, desa bukan lagi sebagai objek pembangunan akan tetapi sudah menjadi subjek dari pembangunan, artinya desa sendirilah yang mengurus urusan rumah tangganya, baik urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai kedua asas utama yang menjadi ruh dalam UU Desa. Asas Rekognisi yang dimaknai sebagai pengakuan atas hak asal-usul desa. Sementara asas Subsidiaritas yang dimaknai sebagai kewenangan yang dimiliki desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur dan mengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa.

Dengan pengakuan ini, desa tidak dilihat hanya sebatas lembaga pemerintahan administrasi negara, namun keberadaan masyarakat sebagai entitas lokal patut diakui dalam desa. Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur kewenangan khusus bagi desa yang meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat. Dalam mengatur dan mengurus desa, penyelenggaraan pemerintahan desa (lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga adat). Perbuatan pemerintah dalam memerintah adalah penggunaan otoritas politik dengan mengedepankan fungsi pemerintahan seperti pengaturan publik, penyediaan kebutuhan publik dan juga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Untuk mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa tentu memerlukan mitra. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Bab XII Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat, dijelaskan bahwa desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dimana Lembaga Kemasyarakatan Desa ini bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa initerdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan lain sebagainya

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. LKD bertugas:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa karena dapat membantu jalannya pemerintahan desa. Selain itu juga, Lembaga Kemasyarakatan Desa juga berguna untuk mengkritik jalannya pemerintahan yang ada di desa agar tidak jauh melenceng dari tujuan desa, lembaga ini juga sangat berguna demi kemajuan desa agar desa juga tidak seenaknya mengambil keputusan.

Sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintah desa, Karang Taruna adalah institusi di ranah desa yang dimotori oleh kepemudaan desa. Peranan pemuda dalam masyarakat sangatlah penting. Setidaknya ada beberapa hal yang mendasari alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab dalam tatanan masyarakat antara lain; a) kemurnian idealismenya; b) keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru; c) semangat pengabdian; d) spontanitas dan pengabdian; e) inovasi dan kreativitasnya; f) keinginan untuk segera mewujudkan gagasan- gagasan

baru; g) keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri; masih langkanya pengalaman- pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada (Taufik, 1974).

Keberadaan Karang Taruna tidak terlepas dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemberdayaan ditunjukkan pada kemampuan seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Harapannya mereka menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar, mampu memperlihatkan sumber-sumber produktif yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan keinginan untuk berpartisipasi pada setiap proses pembangunan beserta keputusan yang tentu akan mempengaruhi kehidupan mereka (Mustanir, etal, 2019). Pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan dorongan, motivasi, dan hal lainnya yang dapat menguatkan atau mengembangkan potensi generasi muda sehingga bisa lebih kreatif dan inovatif. Ketika generasi muda kehilangan jati dirinya maka perlu dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi agar generasi muda tidak terjebak dengan berbagai problematika yang sedang diresahkan oleh masyarakat terkait anak muda yang anti sosial, tawuran antar sekolah atau antar kelompok, terpengaruh dengan obat terlarang maupun minuman keras. Maka dari itu, perlu diberi ruang, dorongan serta motivasi kepada generasi muda, agar mereka semakin sadar terhadap situasi yang sedang mereka hadapi dan juga mereka sadar akan posisi mereka sebagai agen perubahan.

Dalam melaksanakan program pembangunan desa dengan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sebagai bentuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa dalam menjalankan proses pembangunan sumber daya manusia lewat upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya manusia generasi muda melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang insentif kepada generasi muda dengan mengedepankan kebutuhan organisasi karang taruna.

Dalam proses pemberdayaan dan pembinaan karang taruna, pemerintah desa harus memiliki peran dan fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiganya harus dilakukan beriringan atau sejalan tanpa adanya sebuah pemisahan. *Pertama*, regulator ialah pemerintah harus mempersiapkan arah dalam melakukan penyeimbangan penyelenggaraan pemberdayaan karang taruna dengan menetapkan tata tertib atau peraturan dalam keorganisasian guna menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam menjalankan roda keorganisasian agar tetap eksis dan berkelanjutan, *kedua*, dinamisator, ialah pemerintah harus mampu menggerakkan partisipasi dari segala pihak ketika proses pembangunan mengalami hambatan, hal ini dilakukan melalui bimbingan dan pengarahan yang insentif dan efektif. *Ketiga*, fasilitator, pemerintah membantu mempersiapkan segala kebutuhan organisasi karang taruna apabila organisasi sedang membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti biaya, ruangan, ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan kelancaran program kegiatan karang taruna, apabila pemerintah tidak turut andil membantu mempersiapkan berbagai kebutuhan karang taruna maka

sewaktu-waktu karang taruna bisa saja mengalami kemandekan karena ketidakseimbangan generasi muda karang taruna. Maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam membina, mengarahkan, mendorong, dan memfasilitasi kebutuhan organisasi sesuai amanat UU Desa Pasal 26 ayat (1).

Karang Taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan yang ada di seluruh Indonesia dan merupakan wadah organisasi untuk mengembangkan potensi generasi muda yang lebih baik. Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri (Wenti, 2013). Sebagai lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang pembangunan kesejahteraan sosial dan berfungsi sebagai subjek, karang taruna diharapkan mampu menunjukkan fungsi dan perannya secara optimal (Depertemen Sosial RI Dirjen Rehabilitasi dan Pelayan Sosial, Pedoman Pembinaan Program dan Kegiatan Karang Taruna).

Pemuda adalah suatu generasi yang akan mewarisi pembangunan di desa bahkan Negara Indonesia pada masa yang akan datang. Pemuda sebagai generasi penerus, generasi yang mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan. Sejarah mencatat, bahwa pemuda berada pada garis terdepan dalam mengusir kolonial dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Wijaya, 2013). Peran pemuda dalam pembangunan di desa sangatlah penting karena pemuda sebagai lokomotif pembangunan. Seluruh komponen masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di desa. Potensi yang dimiliki desa akan dapat digali dan dimanfaatkan untuk kemakmuran

masyarakat apabila ditunjang dengan motivasi dan kreativitas para pemuda desa.

Setiap desa memiliki regenerasi potensial untuk mengembangkan dan memajukan desa, regenerasi tersebut bisa menjadi seorang *leader* yang mapan. *Leader* yang mapan adalah mereka yang memiliki keterampilan komunikasi yang apik, disiplin yang baik. Potensi yang ada pada SDM, harus dilihat oleh perangkat desa untuk menjaga *sustainable* (keberlanjutan) kaderisasi dengan memperhalus skills, memberikan pelatihan dan mendidiknya. Namun, permasalahan yang sering mengemuka pada pemuda, sering dipicu oleh beberapa hal; *Pertama*, ketidakpercayaan tetua (orang tua) atau dalam hal ini perangkat desa kepada pemuda yang diklaim mimim pengalaman (*hard* dan *soft skill*). *Kedua*, realitas pemuda yang telah menempu studi, pergi merantau kekota mencari pekerjaan sesuai passionnya. *Ketiga*, personalitas pemuda yang masih dalam kecenderungan hedon. *Keempat*, sangsi sosial ketika pemuda lulus studi hanya tinggal dan kerja di desa, yang menyebabkan pemuda memilih meninggalkan desa.

Dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 disebutkan bahwa karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang, atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Keberadaan karang taruna seyogjanya dapat memberikan

perubahan bagi suatu desa karena pemuda atau karang taruna sebagai tulang punggung sebuah desa yang sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Karang taruna sebagai tulang punggung harus mampu memberikan dan menunjukkan perannya melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti terlibat dalam kegiatan kerja bakti, ikut terlibat dalam menyampaikan pendapat dalam rapat desa, dan ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Penguatan fungsi kelembagaan karang taruna dapat terjadi apabila didukung oleh semua komponen termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga kepemudaan tersebut. Dengan kelembagaan yang kuat, pengurus karang taruna akan mampu mengorganisir para anggota untuk dapat menjalankan tugas organisasi secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, sangat dibutuhkan upaya karang taruna dalam berpartisipasi aktif di setiap kegiatan di desa baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bersama yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, karang taruna tidak lepas dari tugas pokok yang telah ditetapkan yaitu secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi kesenjangan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi yang dimiliki generasi muda dilingkungannya demi pembangunan desa kearah yang lebih baik (Yuliati Faatjeri :1).

Selaku wadah generasi muda di desa Karang Taruna dibentuk oleh masyarakat desa atau kalurahan, berdiri sendiri serta independent.



Aktivitas karang taruna dititik beratkan pada program pengembangan bidang kesejahteraan sosial, sehingga tugasnya mengatasi kasus sosial generasi muda di lingkungannya. Ada pula tujuan yang dicapai Karang Taruna terciptanya pemuda yang bertumbuh dalam keadaan jasmani serta rohaninya, bisa melakukan fungsi-fungsi sosial serta bertanggung jawab, mempunyai keinginan dan keahlian untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Keberhasilan dari program pembinaan kaum muda melalui Karang Taruna pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan organisasi karang taruna. Dalam hal ini, eksistensi organisasi selaku lembaga pemberdayaan perlu mendapat dorongan terutama dari lembaga yang terikat dengan pembinaan serta pengembangan organisasi ataupun legislatif (kepala desa/lurah) beserta perangkatnya, BPD, LKMD serta tokoh warga (Suhindamo, 2019).

Dalam rangka untuk mencapai keinginan diatas maka sangat penting bagi karang taruna untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat, karena untuk menjadikan karang taruna sebagai wadah generasi muda yang bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara khususnya dalam pembangunan desa agar supaya roda pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.

Menyadari akan pentingnya peran kaum muda dalam kehidupan masyarakat Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul maka pemerintah Kalurahan telah membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi mitra kerjanya dalam melaksanakan roda pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimaksud adalah Karang Taruna sebagai wadah para pemuda dalam menyalurkan kreativitas

yang mereka miliki. Berdasarkan hasil observasi yang dilalukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa lembaga karang taruna yang ada di Kalurahan Nglindur saat ini sudah tidak aktif lagi. Keberadaan karang taruna bisa terasa pada saat momen-momen besar seperti 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya, hal seperti ini sangat fatal bila dibiarkan secara terus menerus karena masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh karang taruna sebagai mitra kerja dari pemerintah desa dan juga kreatifitas dari pemuda tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Sebagai salah satu lembaga yang menjadi mitra kerja dari pemerintah desa, maka kehadiran lembaga karang taruna memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan pembinaan sebagai spirit utama dari UU No 6/2014 Tentang Desa. Ketidakaktifan karang taruna ini bisa terjadi oleh beberapa hal, *yang pertama*, minimnya SDM yang dimiliki oleh anggota karang taruna sendiri, dan *kedua*, hubungan kurang baik antara karang taruna dan pemerintah desa sendiri. *Ketiga*, banyak anggota maupun pengurus karang taruna sendiri yang sudah berkeluarga sehingga susah membagi waktu untuk ikut dalam kegiatan karang taruna. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan pudarnya semangat karang taruna dalam keterlibatannya akan pembangunan yang ada di desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Governing* Pemerintahan Kalurahan Terhadap Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan perbuatan pemerintah kalurahan terhadap karang taruna dalam pembangunan desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi-studi mengenai pentingnya Kelompok Karang Taruna sebagai mitra kerja dari pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.6/2014. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami pentingnya pemberdayaan kaum muda. Selain itu juga, dapat menjadi masukan dan motivasi dalam melakukan pengembangan Lembaga Karang Taruna.

### **E. Literatur Review**

*Literatur review* digunakan sebagai pedoman peneliti dalam menelusuri studi atau karya-karya yang sudah pernah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Karena pada dasarnya, penelitian tentang karang taruna bukan merupakan suatu hal yang baru. Para Peneliti terdahulupun telah berupaya mengungkap karang taruna di berbagai daerah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berupaya untuk meneliti tentang karang taruna adalah sebagai berikut :

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Yohana Prima, Yuli Ifana Sari dan Dwi Fauzia Putra pada tahun 2021 yang berjudul *Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran karang taruna desa Pandanerejo dalam pembangunan yang ada di desa hanya berfokus kepada pembangunan non fisik yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti gotong royong, ikut terlibat dalam merayakan hari raya nasional Indonesia, hari besar keagamaan, melakukan donor darah sukarela dan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa Pandanrejo. Ditemukan juga bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, karang taruna Desa Pandanrejo mendapat suntikan dana yang diberikan oleh pemerintah desa dan juga dari para donatur masyarakat desa Pandanrejo dan juga sarana dan prasarana yang diberikan berupa kantor kesekretariatan dan juga komputer. Walaupun memiliki fasilitas dan dana yang cukup memadai, peran karang taruna desa Pandanrejo dalam pembangunan desa masih kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh banyak anggota maupun pengurus karang taruna sendiri yang sudah berkeluarga sehingga susah membagi waktu untuk ikut dalam kegiatan karang taruna. Bukan hanya itu saja, penyebab lain yang ditimbulkan berupa masih banyak pemuda yang malas atau kurangnya kesadaran pemuda untuk bergabung di karang taruna dan juga masih adanya konflik dan kesalahpahaman diantara anggota karang taruna karena mis komunikasi. Sampai sejauh ini pun belum ada upaya yang dilakukan oleh pengurus karang taruna dan juga pemerintah desa dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh karang taruna yang ada di desa Pandanrejo ini.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Reza dan Fatimah

Aziz pada tahun 2023 yang berjudul *Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Di Desa Kalimbua*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran karang taruna dalam pembangunan di desa Kalimbua tidak aktif, hal ini terlihat dari kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna desa Kalimbua. Hal ini terjadinya karena tidak adanya jiwa semangat yang dimiliki oleh anggota karang taruna untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. sehingga pemanfaatan akan sumber potensi lokal yang ada di desa Kalimbua berdampak pada pencapaian yang minimal. Faktor utama yang menyebabkan tidak aktifnya karang taruna desa Kalimbua adalah faktor pendidikan, banyak pemuda desa Kalimbua putus sekolah sehingga sumber daya manusia rendah dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi daripada karang taruna. Menyikapi persoalan tersebut maka, pemerintah desa Kalimbua melakukan pengorganisasian kembali organisasi kepemudaan, meningkatkan kerja sama dengan pemuda, meningkatkan alokasi dana dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Ananda Agustina, Izomiddin, Reni Apriani pada tahun 2023 yang berjudul *Partisipasi Politik Organisasi Karang Taruna Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, partisipasi politik yang dilakukan oleh karang taruna desa Gunung Agung ialah dengan mengikuti Musyawarah Desadengan hal tersebut mereka juga bisa mengawasi serta terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan desa. Namun, partisipasi politik karang taruna masih dihadapkan pada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang muncul berupa masih adanya miss komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terutama pemuda desa yang menjadi anggota karang taruna, hal ini dikarenakan pemerintah desa yang kurang terbuka kepada masyarakat sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah semakin menurun dan terindikasi oleh masyarakat bahwa mereka tidak didengar. Hambatan lain yang paling dominan yaitu faktor pendidikan, dimanapara anggota karang taruna harus fokus kepada menyelesaikan pendidikan mereka sehingga mereka dituntut untuk membagi waktu untuk berfokus kependidikan sehingga harus menjadi kurang terlibatnya mereka dalam partisipasi politik dalam pembangunan desa. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan cara melakukan pendekatan partisipasi pasif dan juga partisipasi aktif. Pendekatan pasif seperti mengadakan seminar yang bertemakan pendidikan politik serta partisipasi aktif yakni kerja sama antar pihak swasta dalam pemenuhan fasilitas serta sosialisasi politik.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hertanti pada tahun 2018 yang berjudul *Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masih minimnya informasi tentang karang taruna yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat. Kekurangan dana menjadi persoalan yang paling krusial yang dihadapi oleh karang taruna di desa Cintaratu yang kemudian menyebabkan beberapa program kerja yang dimiliki oleh karang taruna tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya, ketika hal ini diabaikan maka, semangat dan daya juang yang dimiliki oleh karang taruna bisa menurun karena kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah desa.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Ricki Fadli pada tahun 2019 yang berjudul *Partisipasi Pemuda Karang Taruna Mahardika Dalam Pembangunan Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kehadiran karang taruna di Desa Jubel Kidul sangat terasa dimana berbagai kegiatan yang mereka lakukan

seperti kegiatan pada bidang sarana dan prasarana dan juga kegiatan sosial lainnya yang dimana membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat untuk lebih baik dan lebih maju dalam penguasaan pembangunan di Desa Jubel Kidul. Hal seperti inilah yang harus terus dijaga oleh pemerintah desa agar pembangunan desa yang dicanangkan dapat berlangsung secara optimal, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung warga desa terutama warga desa Jubel Kidul. Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Sehingga dapat terciptanya masyarakat madani yang bersatu dan berguna bagi kehidupan masyarakat yang dimulai dari kreativitas pemuda melalui kegiatan karang taruna.

Secara umum, kelima penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada topik penelitian, dimana baik peneliti terdahulu maupun penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan pentingnya peranan karang taruna dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Namun, kelima penelitian terdahulu tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus membahas dan mengkaji perbuatan pemerintah dalam memandang pemuda sebagai salah satu modal sosial dan mitra kerjanya dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Selain itu, yang menjadi pembeda adalah teori atau perspektif yang digunakan. Penelitian ini dipandu oleh teori *Governing* sebagaimana yang telah diajarkan oleh Mazhab Timoho.

## F. Kerangka Konseptual

### 1. Governing

Stephen Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Rulling But Not Governing* menunjukkan perbedaan antara memerintah (*governing*) dan menguasai (*rulling*). Gagasan ini muncul berangkat dari sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir yang mana militer mendominasi dinamika politik dan lini kehidupan masyarakat. Tetapi, kekuatan militer ini tidak menjadi pemerintah karena dia tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengurus. Dalam konteks ini, dominasi kekuatan militer hanya berhenti pada tataran menguasai (*ruling*).

Beberapa literatur juga beranggapan bahwa antara *ruling* dan *governing* memiliki makna yang berbeda. Dimana *rulling* dapat dimaknai sebagai siapapun dapat menguasai dan memiliki unsur dominasi. Sementara *governing* lebih melekat pada pemerintah yang terlegitimasi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Fokus utama *governing* sebagai basis konsep identitas mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum, sementara administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. *Governing* dan kebijakan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, berbicara soal *governing* maka tidak terlepas juga dari kebijakan, karena kebijakan lahir daripada proses *governing* itu sendiri. Kebijakan berarti tindakan utama pemerintah, fungsi pemerintahan adalah *protecting* atau melindungi bukan hanya *promoting*. Kebijakan merupakan jantung pemerintahan dan perbuatan pemerintah dalam memerintah. *Governing*



adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus dan responsible mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (*protecting*) dan pendistribusian (*distributing*) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sutoro Eko, 2021:12-14).

*Governing* diartikan sebagai sebuah kata kerja yang memerintah dimana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan. Menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. *Governing* memiliki padanan kata yang banyak sehingga sulit untuk dipahami. Padanan kata *governing* dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi misalnya: konsep *rulling* (menguasai), konsep *governing* (mengatur dan mengurus), konsep *ordering* (menata atau menciptakan), dan konsep *steering* (mengarahkan).

Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi, dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.

*Governing* yang dimaknai sebagai proses mengatur dan mengurus ini selaras dengan kewenangan desa yang termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana pemerintah desa memiliki

kewenangan yang penuh untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri demi kemandirian desa dan kepentingan masyarakat desa. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur; mengurus; dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan public (*public goods*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah tetapi berdasarkan asas yang termuat dalam UU No 6 Tahun 2014 yakni asas rekognisi dan subsidiaritas. Kedua asas ini diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (*self governing community*), kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini dalam bentuk keputusan alokatif kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB Desa.

Kewenangan lokal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh desa atau mampu dijalankan oleh desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat. Dengan kata lain, kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa.

Kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa). Dalam konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

## **2. Pemerintahan Desa**

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sosiologis desa merupakan gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal di dalam suatu lingkungan dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung dengan alam. Komunitas masyarakat desa di atas kemudian berkembang menjadi kesatuan hukum dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan, atau suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang mengadakan pemerintahannya sendiri (Kartohadikoesoemo, 2002).

UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, pemerintah desa

adalah kepala desa dan perangkat desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberi pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memiliki otoritas dan kewenangan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan amanat Undang-undang. Pemerintah desa merupakan unit terdepan yang berhadapan langsung dengan pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah (Yocoub, 2012:41).

Pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir dari bentukan masyarakat sendiri, dan bukan merupakan hasil rekayasa elit penguasa. Pemerintahan desa yang demokratis mengakui tiga kuasa yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan desa, yakni: *Pertama*, kedaulatan rakyat. Pengakuan adanya kedaulatan rakyat merupakan cermin dari sebuah persepsi mengenai kekuasaan yang rasional, dimana kekuasaan datang dari rakyat dan arena itu harus dipertanggungjawabkan pada rakyat. *Kedua*, parlemen desa yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan. Posisi parlemen desa tidak lebih dari penyambung lidah rakyat, dan tidak memiliki otonomi dihadapan rakyat. Parlemen desa juga bukan sebuah badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat, sehingga ketika sewaktu-waktu dirasakan terjadi pengingkaran suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya. *Ketiga*,

pemerintah desa adalah badan eksekutif yang bertugas menjalankan aspirasi rakyat, untuk menjawab problem dan harapan rakyat.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis maka, perlu menjalankan prinsip partisipasi, pertanggungjawaban dan keadilan. Prinsip partisipasi hendak menunjuk pada suatu prinsip bahwa suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah haruslah mencerminkan dan memperoleh persetujuan dari rakyat. Keputusan yang diambil tidak boleh sepihak. Pertanggungjawabannya merupakan prinsip yang hendak menunjuk pada keharusan semua kelembagaan yang ada untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijalankan. Keadilan hendak menunjuk pada keharusan tidak adanya diskriminasi, pembedaan dan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah hendaknya berdiri di atas semua golongan.

Menurut Sutoro Eko (2021), pemerintah adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, birokrasi, negara atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen. Pemerintah adalah subjek yang memberikan atau menjalankan pemerintahan. Subjek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Kepala Desa, Bupati/Wali Kota, Gubernur dan Presiden) atau lembaga (misalnya Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Negara). Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pemerintah desa adalah aktor sekaligus institusi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yakni: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dan, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut.

Kekuasaan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sangat besar dan bersifat mutlak. Sehingga, kontrol menjadi elemen sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak menjadikan alat bagi penguasa untuk memperdaya rakyat.

### **3. Karang Taruna**

Generasi muda merupakan generasi yang akan mewarisi negara Indonesia pada masa yang akan datang. Berbagai harapan diletakkan agar mereka berupaya menjadi individu yang berguna, serta mampu menyumbang kesejahteraan negara secara keseluruhan dan mampu

menciptakan masyarakat yang madani.

Namun, kenyataannya berbagai pihak mulai menaruh kebingungan tentang gejala sosial yang melanda remaja dan meruntuhkan akhlak generasi muda masa kini. Gejala sosial yang muncul tersebut berupa kenakalan remaja, narkoba dan lainnya. Perkembangan gejala-gejala ini semakin hari semakin meningkat. Fenomena ini cukup serius dan akan bertambah banyak apabila tidak diambil langkah yang tegas untuk membandung berbagai perilaku yang dilakukan tersebut. Mengenai normal tidaknya perilaku kenakalam atau perilaku menyimpang, Emile Durkheim (1985) dalam bukunya berjudul *Ruler of Sociological Method* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal. Hal ini dikarenakan perilaku itu tidak mungkin dapat dihapus secara tuntas. Dengan demikian, suatu perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Sehingga untuk memanilisir gejala sosial yang melanda generasi muda tersebut, maka, diperlukan wadah yang dapat membina dan mengarahkan mereka. Pelaksanaan pembinaan tersebut merupakan tugas dan kewajiban pengurus pelaksana (pemerintah), baik dari tingkat pusat maupun daerah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam masyarkat dengan membentuk suatu organisasi yang nantinya akan menjadi wadah pembinaan generasi muda.

Salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda adalah organisasi kepemudaan atau karang taruna. Karang taruna merupakan salah satu organisasi pemuda yang tidak asing lagi, khususnya

masyarakat pedesaan. Visi dari organisasi ini adalah wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan, serta menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan dengan mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Selain berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungan desa atau kelurahan, fungsi dan peran karang taruna terus ditingkatkan agar dapat menghimpun, menggerakkan, dan menyalurkan peran serta para generasi muda dalam proses pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 77/Huk/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

Karang taruna dikatakan organisasi sosial dikarenakan di dalam wadah tersebut terdapat perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan generasi muda. Karang taruna merupakan tempat diselenggarakan berbagai kegiatan yang dimana kegiatan tersebut sebagai bentuk untuk meningkatkan, membina, serta mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai organisasi sosial kepemudaan karang taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan



dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada. Karang taruan bergerak dibidang kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Depertemen Sosial. Hal ini merupakan wujud daripada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karang taruna didirikan agar para gnerasi muda lebih mudah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, serta menjadikan generasi muda memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Juga berfungsi mendidik para generasi muda sebagai penerus bangsa yang ulet dan tangguh melalui berbagai kegiatan yang bernilai positif.

Kehadiran karang taruna sangat besar manfaatnya dalam mencegah perilaku negatif dari para remaja dan sebagai wadah yang memelihara dan memupuk kreativitas generasi muda dengan memiliki tugas pokok yaitu menggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi para generasi muda, bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

## **G. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabelitas masalah yang

akan dipecahkan (Sugiyono, 2017:207). Adapun fokus dalam penelitian ini, meliputi:

1. Perbuatan Pemerintah Kelurahan terhadap karang taruna
2. Urgensi pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna di tingkat Kelurahan

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moelong (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). (Sugiyono, 2009:8). Deskriptif pada penelitian kualitatif berarti penelitian akan berusaha untuk membuat gambaran umum secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai suatu fakta, sifat, hingga hubungan antarfenomena yang diteliti. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian

deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendiskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya yang hasilnya lebih menekankan makna. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989: 622). Menurut Supranto (2000: 21) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono 2016: 19).

Pada penelitian ini, objek penelitian yang diteliti yaitu *governing* pemerintah kalurahan terhadap pemuda dalam pembangunan desa. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kalurahan

Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta. Dan yang menjadi aktor dari penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Kalurahan Nglindur.

b. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka penguatan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Sugiyono (2009: 216) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan peneliti yang sedang dilaksanakan.

Pemanfaatan informan dalam penelitian ini adalah untuk menjangkau banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam dengan waktu yang singkat. Dengan memanfaatkan informan, peneliti juga dapat melakukan tukar pikiran atau membandingkan kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan dua metode yaitu, *pertama*. Teknik *Purposive sampling*, yaitu Teknik yang digunakan untuk memilih sampel penelitian dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki karakteristik atau kriteria yang sesuai dengan subjek penelitian. *Kedua*, *snowball sampling*, Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari

sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

**Tabel I.1 Daftar Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterangan
1.	Muhammad Hanan Amshori, S.Ip	Laki-laki	51	Lurah
2.	Rina Nur Hasana, S.Pd	Perempuan	35	Carik
3.	Hari Sutanto	Laki-laki	51	Jagabaya
4.	Hamzah Maulana	Laki-laki	28	Ketua Karang Taruna
5.	Lipuro	Laki-laki	33	Wakil Karang Taruna
6.	Risnanto Arum Yuniartono, S.Pt	Laki-laki	42	Anggota Karang Taruna
7.	Saharyanto, S.Pd., MM.Pd	Laki-laki	50	Masyarakat
8.	Drs. Sugeng Wibowo, MPDi	Laki-laki	53	Masyarakat

*Sumber : Data Primer*

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, sehingga dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dikatakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian baik secara langsung maupun terselubung. Menurut

Djuanaidi Ghoydan Fauzan Almanshur (2012: 165), metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Sedangkan menurut Alwasihlah (2003: 211) mengemukakan bahwa observasi adalah penelitian atau pengamat sistematis dan rencana yang diamati untuk perolehan data yang dikontrol validasi dan realibilitas.

Kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati (Yusuf, 2013: 384).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Dengan demikian, peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi secara langsung kepada informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2006: 186). Wawancara dilakukan dalam bentuk

komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dimana dalam pelaksanaannya peneliti tidak terpaku pada pedoman wawancara, sehingga peneliti lebih leluasa dalam menggali informasi secara terbuka dari informan (Sugiyono, 2008: 320). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi yang sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (Moleong, 2006: 163). Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Data-data tersebut berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan data berupa data hasil wawancara dengan informan. Hasil wawancara ini ditulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam

melakukan analisis. Selain itu, data yang diperoleh peneliti berupa dokumen profil lokasi penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

Dalam melakukan analisis data, peneliti perlu mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam jenis penelitian apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu proses mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Data yang dicatat tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.



## 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga memperoleh kesimpulan akhir.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisis dan menulis memo. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang disajikan secara sistematis dan sebaik mungkin sehingga mudah dipahami. Dengan melakukan penyajian data ini, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan hasil kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2018: 341). Dengan sajian data tersebut

membantu untuk memahami sesuatu yang terjadi dan kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Data yang disajikan mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang diperoleh di lapangan selama proses penelitian berlangsung, maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR**  
**DAN KARANG TARUNA NGLINDUR**

**A. Profil Kalurahan Nglindur**

Pentingnya data kalurahan dalam proses perencanaan pembangunan kalurahan membuat Pemerintah Kalurahan harus berusaha untuk menyediakan data terkait karakteristik spesifik kalurahannya, hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk profil kalurahan. Profil kalurahan berguna menggambarkan potensi perkembangan kalurahan yang akurat dan komprehensif. Penyusunan profil kalurahan merupakan proses menemukan dan menggali potensi kalurahan yang nantinya dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan.

Dalam pengembangan kalurahan, profil kalurahan sangat penting untuk menunjang pembangunan kalurahan yaitu sebagai data dasar yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kalurahan. Profil kalurahan digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan kalurahan dalam bentuk fisik dan program peningkatan kapasitas penduduk kalurahan.

**1. Sejarah Kalurahan Nglindur**

Kalurahan sebagai kesatuan teritorial dan administratif yang terkecil di Indonesia yang memiliki karakter tersendiri, disebabkan masing-masing kalurahan atau daerah terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan berbeda-beda. Sejarah sebagai pembelajaran, karena dengan sejarah bisa belajar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dimasa lalu. Sejarah tidak hanya ada dan tidak dipelajari tetapi ada untuk jadi

pembelajaran, sebuah sejarah itu adalah pembelajaran bukan warisan. Sebab warisan yang bekerja adalah yang mewariskan bukan yang diwariskan.

Kalurahan Nglindur adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kronologi historis pemerintahan, Kalurahan Nglindur berdiri atau mulai tersusun bentuk pemerintahan mulai tahun 1929. Hal ini dilihat dari suksesi kepemimpinan di Kalurahan Nglindur, sebagai berikut:

- a. Sebelum tahun 1925 Masehi belum dikenal pemerintahan setingkat Kapanewon, pada saat itu baru berupa Kademangan yang dipimpin oleh Demang. Demang membawahi Bekel, sedangkan di bawah Bekel ada sub pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang Congkok. Dengan demikian bentuk pemerintahan saat itu masih sangat sederhana. Sehingga komunitas masyarakat Nglindur saat itu sudah terbentuk yang dipimpin oleh seorang Bekel, namun belum mengenal sistem pemerintahan.
- b. Pada tahun 1926 Masehi baru terbentuk Kemantren yang dipimpin oleh Mantri Pangreh Proudjo yang berkedudukan di Jerukwudel. Kemantren ini setingkat dengan Kapanewon sekarang, saat itu dijabat oleh Rng. Hardjowidarso.
- c. Pada tahun 1929 Kemantren di Jerukwudel berubah menjadi Order Distrik (masa Belanda) yang berada di bawah Kawedanan. Pejabat Order Distrik Rongkop berkedudukan di Jerukwudel dengan kantor samping pasar Rancah. Pimpinan Order Distrik disebut Asisten Wedodo. Asisten Wedodo yang memrintah pertama kali di wilayah Order Distrik Rongkop yang berada di Jerukwudel bernama Rng.

Harjodikoro. Secara berturut-turut sebelum ibu kota Order Distrik pindah ke Baran, Semungih Asisten Wedodo yang memerintah dengan ibu kota di Jerukwudel adalah: Rng. Hardjodipoerwo, Rng. Hardjo Pandroyo dan Rng. Hardjo Sumantri, baru kira-kira pada tahun 1940- an ibu kota pindah ke Semungih.

- d. Bersamaan dengan dibentuknya Order Distrik sebagai pengganti Kemantren, di Nglindur dibentuk pemerintahan di bawah Kemantren dengan nama Kalurahan Nglindur yang diperintah oleh seorang Lurah Kalurahan yang dibantu oleh Pamong Kalurahan dengan nama Carik, Kamituwo Bayan, Jogomirudo, Jogoboyo, Moden serta para antek (Antek: pembantu Pamong Kalurahan dan di luar struktur pemerintahan).
- e. Dari kronologi terbentuknya pemerintahan Nglindur, dapat dikatakan bahwa Kalurahan Nglindur memulai pemerintahan Kalurahan sejak tahun 1925, sehingga sebelum tahun 1915, komunitas masyarakat dipimpin oleh seorang Bekel. Selanjutnya kepemimpinan di Kalurahan Nglindur berturut-turut sebagai berikut:
  - 1) Sampai dengan tahun 1915 dipimpin oleh Bekel. Belum diketahui Bekel yang memimpin saat itu dan sejak kapan komunitas masyarakat Nglindur dipimpin Bekel belum dapat diketahui secara jelas.
  - 2) Tahun 1915-1926 dijabat oleh Lurah Kalurahan Kerto Semito
  - 3) Tahun 1927-1946 diganti oleh Lurah Kromo Wijoyo
  - 4) Tahun 1946-1956 dipimpin oleh Lurah HS Suparno
  - 5) Tahun 1956-1965 dipimpin oleh Lurah Parto Wijoyo
  - 6) Tahun 1966-1985 dipimpin oleh Lurah Karso Pawiro

- 7) Tahun 1985-2004 dipimpin oleh Lurah Edy Warsito
- 8) Tahun 2004-2014 dipimpin oleh Lurah Sujana
- 9) Tahun 2014-bulan Juni 2015 dipimpin oleh Pejabat Lurah Suprapta
- 10) Bulan Juni 2015-Desember 2015 dipimpin oleh Pejabat Lurah Suharyanto
- 11) Tahun 2016-2022 dipimpin oleh Lurah Supriyana.

## **2. Keadaan Geografis**

Kalurahan Nglindur merupakan salah satu Kalurahan dari 144 Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Nglindur terletak di Kapanewon Girisubo, tepatnya di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak dari pusat ibukota Kabupaten Gunungkidul sejauh 32 km. Luas wilayah Kalurahan Nglindur 617.5630 Ha.

Secara administratif Kalurahan Nglindur, batas wilayah Kalurahan Nglindur yaitu:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Bohol Rongkop Gunungkidul
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tileng Girisubo Gunungkidul
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Melikan Rongkop Gunungkidul
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Semugih Rongkop Gunungkidul

Kalurahan Nglindur terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 500-700 meter diatas permukaan laut. Lahan di Kalurahan Nglindur mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Sementara itu, suhu di Kalurahan Nglindur berada diantara 23,2°C-32°C dengan curah hujan rata-rata sebesar 1382 mm.

Iklm Kalurahan Nglindur sebagaimana Kalurahan-Kalurahan

lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Keadaan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Nglindur. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober, November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari.

Kondisi Kalurahan Nglindur adalah lahan kering dengan bentangan pegunungan dengan struktur batu bertanah. Hingga sampai saat ini belum ditemukan sumber air, sehingga kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan air hanya mengandalkan curah hujan. Potensi untuk tanaman lahan kering padi gogo dan palawija, tanaman buah-buahan (pisang, srikoyo, sirsak, dll), budidaya perikanan darat (telaga) serta usaha budidaya ternak (pembibitan dan penggemukkan). Dengan luas lahan yang dimiliki oleh Kalurahan Nglindur tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan umum lainnya. Pembagian penggunaan tanah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel II.1 Luas Wilayah**

<b>No</b>	<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase</b>
1	Tegal	397,2605	64,32
2	Pekarangan	52,9595	8,57
3	Perkantoran	0,7890	0,13
4	Lapangan Olahraga	0,0600	0,01
5	Kuburan	0,4350	0,07
6	Masjid	0,0984	0,01
7	Sarana Pendidikan	2,3520	0,38
8	Sarana Kesehatan	0,1500	0,02
9	Hutan	125,3410	20,30
10	Prasarana Umum Lainnya	39,2676	6,36
<b>Jumlah</b>		<b>617,5630</b>	<b>100</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Nglindur 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar lahan Kalurahan Nglindur digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya sebagian lahan yang digunakan untuk areal tegal. Dengan demikian, pertanian merupakan potensi utama yang dapat dikembangkan di Kalurahan Nglindur.

### **3. Keadaan Demografi**

Penduduk merupakan potensi yang sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam hal ini, penduduk merupakan aktor perencana dan pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan unsur yang harus mendapatkan perhatian baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

#### **a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Nglindur tercatat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang dan perempuan 2.187 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Nglindur berjumlah 4.368 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Nglindur hampir berimbang.

#### **b. Penduduk Berdasarkan Usia**

Penduduk Kalurahan Nglindur dengan jumlah usia terbanyak 26-40 tahun yang berjumlah 943 orang dan jumlah paling sedikit yaitu usia >75 tahun. Dimana Kalurahan Nglindur memiliki banyak orang dewasa, terutama orang tua kalangan perempuan berjumlah 490 orang dan laki-laki 453 orang. Kemudian untuk yang berusia 75 tahun paling sedikit laki-laki mendominasi berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang. Berikut merupakan rincian tabel



berdasarkan golongan usia:

**Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>Kelompok Berdasarkan (Tahun)</b>	<b>Laki-Laki (Jiwa)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
0-6	125	5,73	119	5,44	244
7-12	108	4,95	144	6,58	252
13-18	178	8,16	189	8,64	367
19-25	181	20,70	211	9,65	392
26-40	453	8,58	490	22,41	943
41-55	479	21,96	451	20,62	930
56-65	312	14,30	276	12,62	588
65-75	319	14,62	286	13,08	605
>75	26	1,9	21	0,96	47
<b>Jumlah</b>	<b>2.181</b>	<b>100.00</b>	<b>2.187</b>	<b>100.00</b>	<b>4.368</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Nglindur 2022*

Tabel ini menunjukkan Kalurahan Nglindur memiliki besarnya potensi akan sumber daya manusia produktif dan akan semakin besar pada 10 tahun mendatang. Hal ini sesuai dengan kondisi umum secara nasional dimana pada tahun 2034 akan menghadapi bonus demografi, dimana jumlah usia produktif lebih besar daripada usia non produktif. Kondisi ini adalah momentum penting untuk mengeksplorasi pembangunan. Dengan demikian cita-cita menjadikan Kalurahan Nglindur yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud melalui pola pembangunan partisipatif, dimana keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan, dengan kata lain menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

**c. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar

apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2022 jumlah penduduk yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi bisa dikatakan sangat minim. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kalurahan dan juga bagi orang tua untuk membangun kesadaran disetiap orang akan arti pentingnya pendidikan. Jumlah penduduk Kalurahan Nglindur berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis sekolah	Laki-laki	Persentase	Perempuan	Persentase	Jumlah
1.	SD	452	43,93	464	46,35	916
2.	SMP	314	30,51	324	32,37	638
3.	SMA	196	19,05	172	17,18	368
4.	PT	67	6,51	41	4,10	108
<b>Jumlah</b>		<b>1.029</b>	<b>100</b>	<b>1.001</b>	<b>100</b>	<b>2.030</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Nglindur 2022*

Data diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam menempuh pendidikan tidak terlalu besar artinya bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal mengakses pendidikan. Dimana, seperti kita ketahui bahwa perempuan selalu mendapatkan diskriminasi sosial yang membuat kebanyakan perempuan tidak menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, dimasa sekarang dengan prinsip demokrasi yang berkembang saat ini memberikan peluang bagi setiap orang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi baik itu laki-laki maupun perempuan dan memiliki kesempatan yang sama di depan publik.

Walaupun demikian, secara kualitas sumber daya manusianya sangat rendah hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah oleh masyarakat Kalurahan Nglindur. Sehingga pemerintah perlu melaksanakan pembangunan yang mengarahkan pada pemberdayaan dan juga pembinaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat sehingga dapat turut andil dalam pembangunan di Kalurahan Nglindur.

d. **Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Berikut tabel yang menunjukkan penduduk Kalurahan Nglindur berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel II.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	800	200	1.000
Buruh Tani	80	80	160
bu Rumah Tangga	0	640	640
Perangkat Desa	28	4	32
uruh Harian Lepas	480	230	710
<b>Jumlah</b>	<b>1.388</b>	<b>1.154</b>	<b>2.543</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Nglindur 2022*

Data diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Nglindur didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis yang ada di Kalurahan Nglindur yang berupa lahan kering. Kondisi ini menunjukkan sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Nglindur mesti melakukan perlindungan dan juga memfasilitasi petani dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memfasilitasi petani dalam menemukan pasar yang jelas dalam memasarkan komoditi dan hasil produksinya.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Nglindur bisa dikatakan cukup memadai, hal ini agar supaya bisa menjadi salah satu faktor pendukung kegiatan masyarakat khususnya kegiatan perekonomian. Sarana dan prasarana Kalurahan Nglindur diantaranya, sebagai berikut:

- a. Sarana kesehatan: Sarana kesehatan yang ada di Kalurahan Nglindur adalah puskesmas pembantu 1 buah, poskesdes 1 buah, dan posyandu 8 buah.
- b. Sarana peribadatan: Dalam bidang keagamaan diupayakan adanya hubungan yang harmonis antara umat beragama, sedangkan sarana peribadatan yang ada di Kalurahan Nglindur adalah masjid sebanyak 8 buah.
- c. Sarana transportasi: Jaringan transportasi yang ada, selain berfungsi untuk menghubungkan Kalurahan di dalamnya juga merupakan penghubung dengan di luar wilayahnya. Jalur jalan yang menghubungkan Kalurahan atau kota di wilayah ini cukup terjangkau oleh angkutan transportasi. Kondisi jalan di Kalurahan Nglindur umumnya sudah perkerasan dan dapat dijangkau walaupun masih ada beberapa ruas jalan yang masih perlu perbaikan.
- d. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di beberapa Padukuhan yang terdiri dari sumur galian 9 unit dan PAH 1.267 unit. Sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak. Meskipun demikian, wilayah yang mayoritas kegiatan masyarakat di sektor pertanian ini belum memiliki irigasi pengairan.

- e. Adanya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan seperti kantor dan peralatannya, serta inventaris lainnya. Dalam hal ini lembaga-lembaga tersebut ialah Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan lembaga lainnya, meski demikian belum semua memadai.

## **5. Kondisi Sosial Ekonomi**

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah Kalurahan dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan Kalurahan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Kalurahan Nglindur berasal dari peternakan, pertanian, dan perikanan darat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga sektor ini menjadi andalan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Kalurahan Nglindur.

Sektor pertanian dalam menyumbang PDRB terbesar merupakan refleksi dari luasnya lahan yang dimiliki dan mata pencaharian terbesar masyarakat Nglindur adalah petani. Perkembangan peranan sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar untuk pertumbuhan dari tahun ke tahun semakin menurun adalah akibat dari curah hujan yang semakin rendah dan waktu pergantian musim yang tidak pasti. Sedangkan sumbangan sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua adalah sektor perdagangan dan jasa.

## 6. Kondisi Budaya

Budaya sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Budaya juga dapat dijadikan modal untuk menaikkan citra diri suatu daerah sekaligus menjadi nilai-nilai fundamental yang berfungsi merekatkan persatuan dan kesatuan.

Pengembangan akan budaya ini selaras dengan asas yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu asas Rekognisi dimana negara mengakui hak asal usul desa/kalurahan, hak asal usul yang dimaksudkan disini adalah mengenai kebudayaannya. Sehingga sudah semestinya kebudayaan yang sudah ada sejak turun temurun tersebut perlu dikembangkan dan mengakar didalam jiwa setiap masyarakat kalurahan.

Hingga saat ini, Kalurahan Nglindur dalam kehidupan masyarakatnya masih kental akan kebudayaan yang dimilikinya yang saat ini masih tumbuh dan berkembang dengan pesat, diiringi dengan pembinaan rutin baik oleh pemerintah maupun swasta. Kebudayaan yang ada di Kalurahan Nglindur diantaranya yaitu, sebagai berikut :

Seni Pertunjukan : Ketoprak, wayang kuli

Adat Tradisi : Bersih Kalurahan, rasul Padukuhan, gumbregen, mitoni,  
puputan, wiwitan, ngrim wedak, singgulan, dll

Seni Musik : Karawitan, gejog lesung, thoklik, dan hadroh

Seni Tari : Tari tradisional, sendra tari, reyog, dan jathilan.

## **7. Kondisi Pemerintahan**

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kedudukan pemerintah kalurahan merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintah kalurahan merupakan unsur organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Dengan demikian pemerintah kalurahan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan pemerintah, pembangunan nasional, dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan tolak ukur tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena Pemerintah Kalurahan dalam organisasi nasional adalah merupakan faktor penggerak utama bagi pengelolaan sumber-sumber daya yang ada di wilayahnya dalam mendorong tercapainya tujuan nasional.

Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa : Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan adalah sebagai suatu penyelenggara dalam pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan oleh Lurah yang dibantu dalam proses kerjanya oleh perangkat Kalurahan sebagai unsur dalam penyelenggara pola pemerintahan Kalurahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Pemerintahan

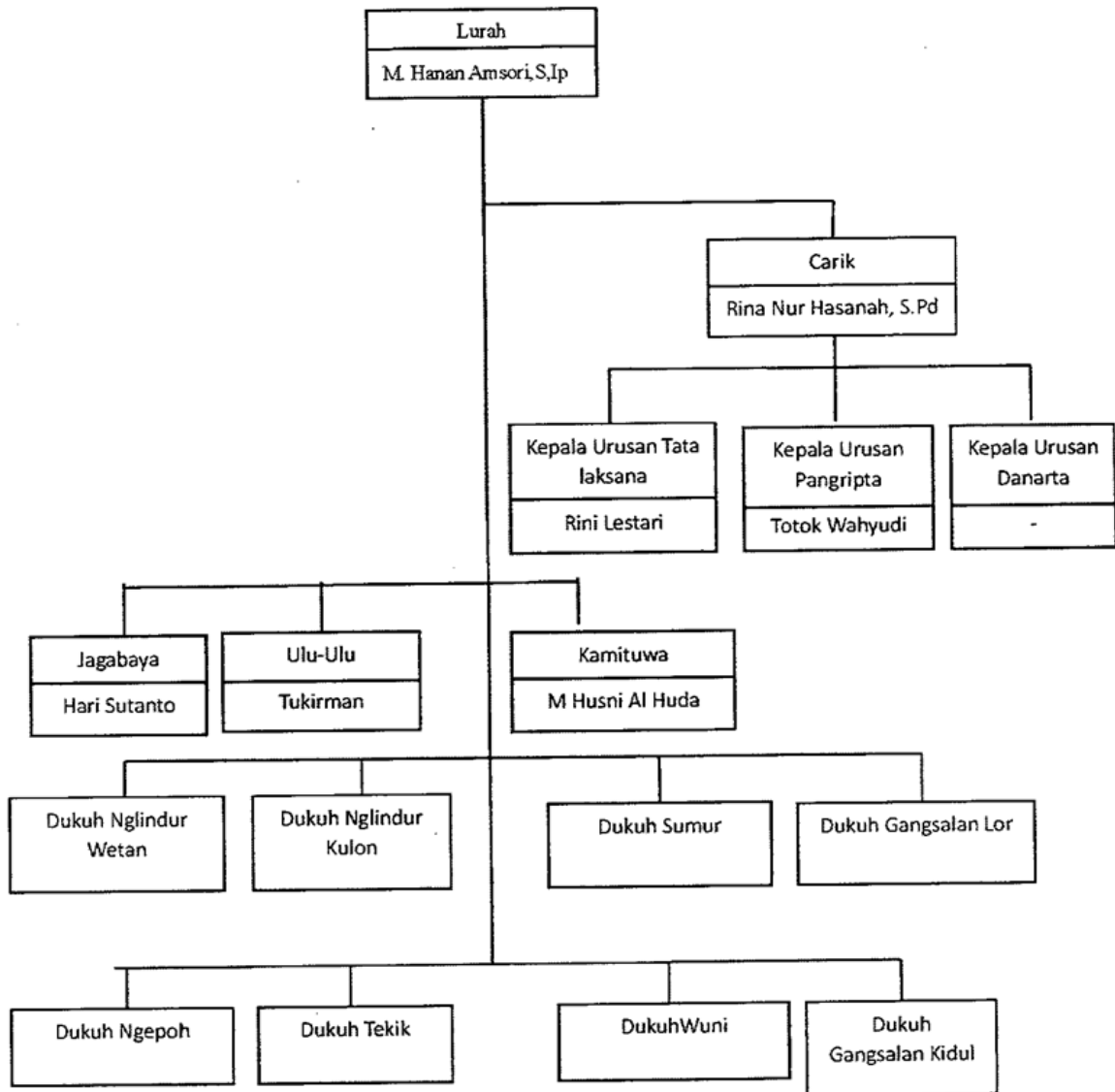
Kalurahan Nglindur terdiri dari Lurah beserta Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan terdiri atas Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Carik, Urusan Teknis, dan Unsur Kewilayaan. Pamong Kalurahan dimaksud bertanggungjawab kepada Lurah dan membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara administratif, Kalurahan Nglindur dalam penyelenggaraan pemerintahannya terbagi dalam 8 padukuhan, 8 RW, dan 28 RT. Pemilihan RW dan RT ini dilakukan secara demokratis melalui rembug masyarakat. Demokrasi ini sebagai bentuk perwujudan demokrasi delibertaif yang secara turun temurun dilakukan, artinya bahwa musyawarah yang tidak pernah melibatkan politik uang.

Dalam usahanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diselenggarakan pelayanan satu pintu dengan menggunakan pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien, dan ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Kalurahan Nglindur.



**Bagan II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Nglindur**



*Sumber : Profil Kalurahan Nglindur 2022*

Dari bagan diatas menggambarkan tentang struktur dan tata kerja organisasi Kalurahan Nglindur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 2020 Tentang Pemerintah Kalurahan. Kalurahan adalah desa diwilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Keterangan :

- a. Lurah (Kepala Desa)
- b. Carik (Sekretaris Desa)
- c. Danarta (Kaur Keuangan)
- d. Tata Laksana (TU)
- e. Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan)
- f. Jagabaya (Kasie Pemerintah)
- g. Ulu-ulu (Kasie Kesejahteraan)
- h. Kamituwa (Kasie Pelayanan)

## **8. Kondisi Badan Permusyawaratan Kalurahan**

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dalam melaksanakan tugasnya BPKal mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki tugas pokok yaitu merancang dan menetapkan peraturan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja dari pemerintah kalurahan serta menyelenggarakan musyawarah kalurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang bertugas

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hendaknya BPKal turun langsung ke masyarakat melalui RT dengan mengadakan musyawarah di tingkat RT. Musyawarah ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan pada saat musyawarah kalurahan.

Dapat diketahui bahwa BPKal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah. Sedangkan fungsi politik BPKal yaitu: Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, melakukan pengawasan kinerja Lurah. Ketiga, menyelenggarakan musyawarah kalurahan.

**Tabel II.5 Struktur BPKal Kalurahan Nglindur**

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Sugeng Wibowo, M.PdI	Ketua
2.	Prapto Prayitno	Wakil Ketua
3.	Tusiran	Sekretaris
4.	Suntoro	Kabid Pemerintahan
5.	Jarwanto	Kabid Pembangunan
6.	Gunanto	Anggota
7.	Tatik Haryatun, S.Pd	Anggota

*Sumber : Profil Kalurahan Nglindur 2022*

## 9. Kondisi Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah kalurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kalurahan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Lembaga masyarakat yang ada di Kalurahan

Nglindur terdiri dari : LPMK, BPKal, PKK, Posyandu, Linmas, RT, RW, Karang Taruna, Kelompok Tani, Organisasi Keagamaan, UMKM.

Lembaga masyarakat ini memiliki tugas yaitu

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Setiap lembaga-lembaga sosial yang ada di Kalurahan Nglindur tercipta sesuai dengan fungsinya masing-masing lembaga dan menjadi sebuah wadah bagi masyarakat yang ada dalam mengembangkan kemampuan, kreativitas sesuai dengan bidang-bidang yang ada.

Hadirnya lembaga kemasyarakatan ini menjadi wadah bagi masyarakat kalurahan yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di masing-masing lembaga yang tersedia di Kalurahan Nglindur. Peran suatu lembaga sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan di Kalurahan. Dengan adanya lembaga masyarakat ini, harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang dan fungsinya.

## **10. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

### **a. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka

menengah yakni 6 (enam) tahun. Visi pembangunan jangka menengah kalurahan periode 2021-2027, merupakan penjabaran visi Lurah terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis kalurahan sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalurahan Nglindur, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2021-2017 adalah : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Nglindur yang bertakwa, berbudaya, bermartabat, dan sejahtera.

Visi diatas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh pemerintah Kalurahan Nglindur pada tahun 2021-2027, yaitu: Terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. Selalu mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya serta tepat sarannya. Selalu meningkatkan profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkatnya. Visi Kalurahan tersebut diselaraskan dengan visi daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu: Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi Kalurahan Nglindur, Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Nglindur yang Bertakwa, Berbudaya, Bermartabat dan Sejahtera.

Selaras dengan visi dan arah pembangunan Lima Tahun Keempat RPJD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005- 2025.

b. **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategi yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi kalurahan.

Upaya-upaya tersebut sebagai berikut :

Misi I:	Mengoptimalkan pemerintah yang bersih dan transparan
Tujuan:	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah Kalurahan
Sasaran:	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat, masyarakat, pemerintah kalurahan, lembaga pemerintah kalurahan dan lembaga kemasyarakatan kalurahan
Misi 2:	Meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama
Tujuan:	Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai
Sasaran:	Seluruh warga kalurahan
Misi 3:	Menggali potensi SDM yang berbudaya
Tujuan:	Mengembangkan kualitas individu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
Sasaran:	Tidak ada lagi anak putus sekolah, tumbuhnya kelompok keterampilan baru, tersedianya TTG pertanian dan peternakan

Misi 4:	Meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, dan kesehatan
Tujuan:	Terwujudnya pembangunan ekonomi, pendidikan, pertanian, kesehatan, serta sarana dan prasarana
Sasaran:	Tersedianya pos layanan teknologi tepat guna, partisipasi sosial

## B. Gambaran Umum Karang Taruna

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial yang menjadi kekuatan kaum muda di Kalurahan dalam membantu masyarakat. Karangtaruna menjadi bagian penting dimana kaum muda bebas berkreasi dan mengembangkan setiap kemampuan baik itu secara pribadi maupun antar anggota dalam mencapai kesejahteraan masyarakat setempat. Proses pembentukan karang taruna dilandasi oleh kesadaran setiap anggota masyarakat dengan kata lain ini menjadi bagian sosialisasi antar setiap masyarakat.

Kalurahan Nglindur sendiri juga telah memiliki organisasi Karang Taruna yang melekat dengan pemerintah Kalurahannya. Organisasi ini baru saja melakukan reorganisasi atau pergantian pengurus yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau vakum akibat pandemi covid-19. Reorganisasi ini dilakukan atas inisiasi pemuda desa yang kemudian disahkan oleh pemerintah kalurahan. Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga yang dimana telah diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari kalurahan sampai pada tingkat nasional. Hal ini sebagai wujud dari regenerasi

organisasi demi kelanjutan organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan marwah Karang Taruna pada umumnya, Karang Taruna Kalurahan Nglindur didirikan dengan tujuan membentuk setiap anggota agar menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sikap solidaritas dan toleransi terhadap sesama, mampu berpikir tanggap, kritis dan peduli terhadap perkembangan sekitar serta memiliki wawasan yang luas dan mengikuti perkembangan zaman. Orientasi diatas adalah jewantah dari tujuan umum karang taruna yang lebih mengedepankan kolektivitas pemuda dalam rangka mengemban tanggung jawab sosial, memberikan pelayanan dan menjadi wadah bagi pemuda untuk merumuskan langkah-langkah strategis atau program kegiatan yang membantumasyarakat melestarikan kultur budaya sosial, memberikan inovasi yang mampu masyarakat bergerak maju, dan karang taruna mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat serta berpikir kritis mengani setiap isu, dengan kata lain karang taruna Kalurahan Nglindur mampu menyiasati perubahan dan gejala-gejala yang ada.

Karang Taruna Kalurahan Nglindur adalah organisasi sosial generasi muda yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat dibidang kesejahteraan sosial. Karang Taruna Kalurahan Nglindur memiliki tugas pokok bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Karang Taruna Kalurahan Nglindur sendiri dibantu oleh sub unit

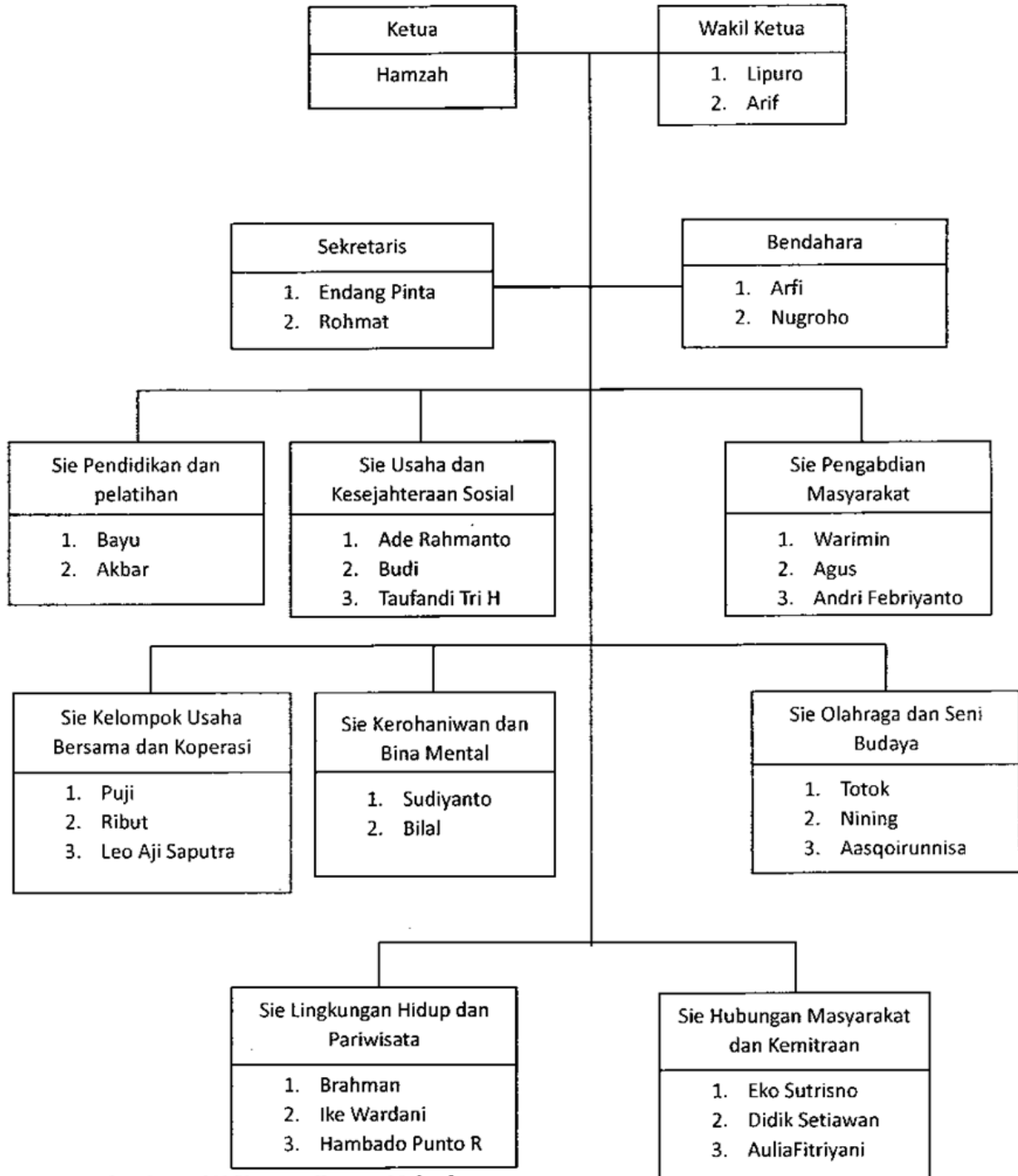


karang taruna yang berada di setiap padukuhan yang ada di Kalurahan Nglindur yang telah terbentuk dan juga bekerja sama dengan pemerintah yang ada di tingkat Kaluhan hingga pada tingkat nasional.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud maka fungsi dari Karang Taruna Kalurahan Nglindur adalah :

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda
- b. Menumbuh, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan karakter sosial dengan bidang minat dan bakat, seperti keolahragaan, kesenian, kewirausahaan, keorganisasian, kependidikan dan keahlian khusus.
- d. Sebagai wadah berkumpul, berdiskusi, berdinamika dan menampung aspirasi pemuda Kalurahan Nglindur.
- e. Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda.
- f. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- g. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
- h. Menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antar generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

**Bagan II.2 Struktur Organisasi Karang Taruna Nglindur**



Sumber : SK Karang Taruna Nglindur

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait *Governing* Pemerintah Kalurahan Terhadap Karang Taruna yang ada di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Pemerintah Kalurahan Nglindur telah mengakui keberadaan Lembaga Karang Taruna yang ada di Kalurahan Nglindur sebagai salah satu mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan legalitas formal kepada Karang Taruna, pemberian legalitas ini dalam bentuk penetapan Surat Keputusan (SK) Nomor: 12a/KPTS/2023 tentang pembentukan Karang Taruna. SK ini menjadi payung hukum bagi karang taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah Kalurahan Nglindur sebagai pemegang otoritas tertinggi di Tingkat Kalurahan, mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur keberlanjutan dan keberlangsungan organisasi karang taruna sehingga kehadiran dari karang taruna ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Nglindur.

*Kedua*, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan karang taruna, maka pemerintah Kalurahan Nglindur telah mengalokasikan dana yang termuat dalam APBKal di setiap tahunnya, untuk tahun 2023 diberikan anggaran sebesar Rp.2.875.000,00. Dalam Upaya untuk mendapatkan dana dari kalurahan maka karang taruna menyampaikan aspirasi pada saat Musrenbang

ditingkat kalurahan agar kebutuhan karang taruna bisa terpenuhi. Selain itu juga, karang taruna mengajukan proposal baik kepada pemerintah kalurahan maupun kepada donator lainnya, hal ini dilakukan guna menyokong segala kebutuhan karang taruna yang ada. Pengalokasian dana ini berkaitan erat dengan fungsi pemerintah untuk memperkuat kemampuan Masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki. Karang taruna akan tumbuh menjadi institusi yang kokoh dan eksis jika ditopang dengan alokasi dana yang memadai.

*Ketiga*, proses pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Nglindur terhadap Karang Taruna masih minim. Pemerintah Kalurahan Nglindur masih mengandalkan pihak ke tiga atau pihak dari luar dalam melakukan pembinaan terhadap karang taruna berupa pemeberian pelatihan maupun sosialisasi. Pelatihan yang telah diberikan itu juga belum dirasakan oleh semua anggota karang taruna tetapi hanya Sebagian anggota saja yang dirasa mempunyai skil atau potensi berdasarkan materi pelatihan yang diberikan. Hal ini dapat juga dilihat bahwa keperhatian pemerintah Kalurahan Nglindur terhadap karang taruna masih minim dikarenakan belum adanya suatu kebijakan atau perbuatan yang menonjol yang dikeluarkan oleh pamarintah Kalurahan Nglindur. Walaupun karang taruna diberikan ruang di setiap hari besar seperti momen 17-an dan hari besar lainnya, akan tetapi kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun yang dilaksanakan. Karang taruna membutuhkan sebuah terobosan baru dalam meningkatkan keterampilan serta meningkatkan ilmu pengetahuan bagi organisasi karang taruna. Pemerintah Kalurahan Nglindur sebagai institusi

yang berwenang mengatur dan mengurus harus bertanggung jawab penuh terhadap karang taruna agar dapat menciptakan generasi yang inovatif dan kreatif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengajukan beberapa saran berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun saran-saran tersebut adalah, sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Kalurahan Nglindur**

Pemerintah Kalurahan Nglindur diharuskan memperhatikan tugasnya terkait pembinaan terhadap karang taruna dengan memberikan pelatihan dan juga sosialisai terkait tupoksi dari Lembaga karang taruna sebagai salah satu mitra kerjanya. Dengan begitu, pemerintah Kalurahan Nglindur tampil sebagai institusi sekaligus aktor yang dapat menjalankan tugas mengatur dan mengurus dengan baik.

Pemerintah Kalurahan Nglindur juga diharuskan terus memberdayakan Masyarakat kalurahan, terlebih khusus kepada karang taruna. Dengan demikian dapat mempersiapkan generasi muda yang terampil dan inovatif dimasa yang akan datang. Karena karang taruna merupakan ujung tombak dan juga generasi penerus Pembangunan yang ada di Kalurahan Nglindur dimasa depan.

### **2. Bagi Organisasi Karang Taruna**

Karang Taruna diharuskan menjadi salah satu wadah bagi generasi muda yang ada di Kalurahan Nglindur dalam mengembangkan potesnsi dan kemampuan yang mereka miliki, oleh karena itu, sebagai generasi penerus maka karang taruna harus menyadari apa yang menjadi tugas dan fungsi

mereka di Tengah Masyarakat. Sebagai salah satu mitra kerja pemerintah Kalurahan Nglindur, maka diharuskan karang taruna dapat turut andil dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kontroling, hingga tahap evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Taufik,dkk. 1974. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Arikuntoro, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD ACCES.
- Eko, Sutoro. 2014. *Kedudukan, Kewenangan, dan Tata Kelola Desa*. FPPD. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro,2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD “APMD”.
- Kurniadi, Edy. 1897. *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Semiawan, Conny, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karekteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Rosdakarya.
- Triputro, Widodo. 2019. *Regulasi Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Work, Lapera Team. 2001. *Politik Pemberdayaan (jalan menuju otonomi desa)*. Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama.

### Jurnal

- Agustina, Ananda. *Partisipasi Politik Organisasi Karang Taruna Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*. JSIPOL. 2 (1). 2023.
- Astika, Yulia Wiji, dkk. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Di Desa Bangko Pintas Kabupaten Tebo Jambi*. Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora. 7 (1). 2023

Fadli, Ricki. *Partisipasi Pemuda Karang Taruna Mahardika Dalam Pembangunan Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan*. Nurani. 19 (1). 2019.

Hertanti, Siti. *Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Moderat. 4 (4). 2018.

Kurniasari, Dewi, dkk. *Peranana Organisasi Karang Taruna Dalam Mengembangkan Kreativitas Generasi Muda Di Desa Ngembalrejo*. Unnes Civic Education Journal. 2 (2). 2013.

Kawalod, Farra Aprilia, dkk. *Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Tewasen, Desa Pondos, Desa Elusen, Desa Wakan, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan)*. JAP. 31 (3). 2015.

Rintjap, Gerry Henly, dkk. *Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda Di Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 1 (1). 2018

Prima, Yohana, dkk. *Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Pandenrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu*. 6 (2). 2021.

Syamsuddin, M.Pd. *Pemuda Sebagai Fasilitator Pedamping Desa*. Journal Of Millennial Community. 1(2). 2019.

Reza, Muh dan Fatimah Aziz. *Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Di Desa Kalimbua*. Journal Of Social Science Research. 3 (3). 2023.

Wadu, Ludovikus Bomas, dkk. *Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kegiatan Karang Taruna*. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan. 9 (2). 2019.

Yeyet, Neng. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 6 (4). 2019.

### **Internet**

<https://www.gramedia.com/literasi/karang-taruna/>

<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

### **Sumber Lain**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permensos No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna



Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Permensos No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Peraturan Gubernur DIY No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan

Kalurahan

Dokumen Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2022

## **PANDUAN WAWANCARA**

### **A. Lurah Kalurahan Nglindur**

1. Bagaimana Bapak melihat Karang Taruna di Kalurahan Nglindur ?
2. Apakah ada kebijakan tentang Karang Taruna ?
3. Sejauh ini bagaimana keterlibatan Karang Taruna dalam program yang dilaksanakan oleh Kalurahan ?
4. Apakah ada pendanaan untuk Karang Taruna di Kalurahan Nglindur?
5. Apakah kehadiran Karang Taruna bisa membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Nglindur?

### **B. Carik Kalurahan Nglindur**

1. Bagaimana Ibu melihat keaktifan Karang Taruna di Kalurahan Nglindur ?
2. Apakah ada program pembinaan bagi Karang Taruna di Kalurahan Nglindur?
3. Apa saja permasalahan atau kendala dalam melakukan pengembangan Karang Taruna di Kalurahan Nglindur ?
4. Bagaimana interaksi antara Karang Taruna dan Pemerintah Kalurahan Nglindur?

### **C. Jagabaya (Kasie Pemerintahan)**

1. Bagaimana respon pemerintah terhadap karang taruna?
2. Sejauh mana pembinaan dan pemberdayaan karang taruna oleh pemerintah Kalurahan Nglindur?
3. Apa saja kendala dalam pengembangan karang taruna?
4. Sejauh ini apa kontribusi dari karang taruna terhadap Kalurahan Nglindur?


#### D. Pengurus dan Anggota Karang Taruna

1. Bagaimana dinamika Karang Taruna dari tahun ke tahun?
2. Menurut saudara apakah eksistensi Karang Taruna memberikan manfaat kepada masyarakat Nglindur ?
3. Apakah ada pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa maupun pihak supra desa dalam pengembangan Karang Taruna?
4. Apakah kebutuhan Karang Taruna sudah terakomodir oleh pihak Pemerintah Kalurahan Nglindur?
5. Bagaimana interaksi Karang Taruna dengan pihak Kalurahan dengan masyarakat Nglindur?
6. Bagaimana saudara melihat antusiasme masyarakat Kalurahan Nglindur?
7. Apa yang menjadi kendala dalam kemajuan Karang Taruna Kalurahan Nglindur?

#### E. Masyarakat Kalurahan Nglindur

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh karang taruna?
2. Apakah ada kegiatan karang taruna yang melibatkan masyarakat?
3. Menurut anda seberapa efektif program karang taruna?
4. Menurut pendapat anda seberapa responsif karang taruna menanggapi program dan permasalahan kelurahan?
5. Apakah karang taruna terlibat penting dalam kegiatan kemasyarakatan

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

 **SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)  
Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

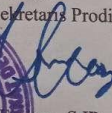
Nomor : 050/PEM/J/V/2023  
Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi


K e p a d a :  
Drs. R.Y Gatot Raditya, M.Si  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"  
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Chasirimus Leu  
No. Mahasiswa : 19520081  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul : 5 Mei 2023  
Judul Proposal : Governing Pemerintahan Kalurahan Terhadap Pemuda dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Pegerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Mei 2023  
Ketua  
dan Sekretaris Prodi  
  
Mohammad Fataus, S.IP., M.A.





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER TERAKREDITASI B  
• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 560775. Fax. (0274) 515989. website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 790/1/U/2023  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 23 Oktober 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Chasirimus Leu  
No Mhs : 19520081  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Governing Pemerintahan Kalurahan Terhadap Karang Taruna dalam Pembaguna Desa di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul  
Tempat : Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul  
Dosen Pembimbing : Drs. R.Y Gatot Raditya, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Oktober 2023  
Ketua  
  
Dr. Sukoro Eko Yunanto  
NIIY. 170 230 190





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 448/IT/2023

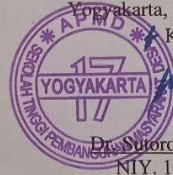
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Chasirimus Leu  
Nomor Mahasiswa : 19520081  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul  
b. Sasaran : Governing Pemerintahan Kalurahan Terhadap Karang Taruna dalam Pembaguna Desa di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul  
c. Waktu : 23 Oktober 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Ketua



*Milis*  
Dis. Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GIRISUBO  
**PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR**

*Desa Nglindur*

Jalan Sadeng Km. 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul Pos : 55883  
Posel : desanglindur@gmail.com Laman : www.desanglindur.gunungkidulkab.go.id

Nomor : 070/261/X/2023  
Lamp. : -  
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Nglindur, 27 Oktober 2023

Kepada:

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Nomor : 448/I/T/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Permohonan Izin Penelitian di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

Nama : Chasirimus Leu  
NIM : 19520081  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Governing Pemerintahan Kalurahan Terhadap Karang Taruna dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul  
Waktu : 23 Oktober 2023 s/d selesai  
Lokasi : Kalurahan Nglindur

Dengan ini Pemerintah Kalurahan Nglindur memberikan Izin kepada nama tersebut di atas untuk melakukan kegiatan tersebut.

Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Lurah Nglindur,

M. HANAN AMSHORI, S.IP





Wawancara peneliti dengan Bapak Hanan Amshori selaku Lurah Kalurahan Nglindur



Wawancara peneliti dengan Ibu Rina selaku carik Kalurahan Nglindur





Wawancara peneliti dengan Mas Lipuro selaku Wakil ketua Karang Taruna Nglindur



Wawancara peneliti dengan Mas Hamzah selaku Ketua Karang Taruna Nglindur



Wawancara peneliti dengan Bapak Saharyanto selaku Masyarakat Kalurahan Nglindur



Wawancara peneliti dengan Bapak Hari Sutanto selaku Jagabaya Kalurahan Nglindur



Wawancara peneliti dengan Mas Arum selaku Anggota Karang Taruna Nglindur



Wawancara peneliti dengan Pak Sugeng selaku Masyarakat Kalurahan Nglindur